



**PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/
PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum

TAUFIK EFFENDI
1720622102

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA ; TAUFIK EFFENDI
NPM : 1720622102

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta, Januari 2021
Yang Menyatakan



TAUFIK EFFENDI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : TAUFIK EFFENDI
NPM : 1720622102
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (Non- exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) , merawat dan mempublikasikan Tesis selama mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya.

Dibuat di ; Jakarta,
Pada tanggal : Januari 2021
Yang Menyatakan



TAUFIK EFFENDI

PENGESAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : TAUFIK EFFENDI
NPM : 1720622102
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP
NOTARIS/ PPAT DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI

Telah berhasil dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.




Dr. Atik Winanti, SH.MH
Ketua Penguji



Iwan Erar Joesoef SH .MKn
Penguji I/ Pembimbing II



Dr. Handoyo Prasetyo, SH.MH
Penguji II/Pembimbing I



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH.LLM
Ka Prodi

Ditetapkan di ; Jakarta,
Pada tanggal : Januari 2021

PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*

Taufik Effendi* Handoyo Prasetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat Jalan Naripan No.25 Bandung Jawa Barat 40111
email: eff_30700@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa/ Penuntut Umum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Notaris/PPAT dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (spiltzing) dari Sertifikat HGB (Induk) terkait penyimpangan pemberian fasilitas KPR sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No : 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR bertentangan dengan Kepmen Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 dan PP Nomor 37 Tahun 1998. Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang diterapkan dalam suatu perkara hukum melalui pendekatan kasus (*case approach*) maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Delik Penyertaan dalam pasal 55(1) ke -1 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban khususnya turut serta melakukan yaitu medepleger dapat diterapkan terhadap Notaris/ PPAT apabila terpenuhinya unsur- unsur kesalahan dan dalam rangka penerapan delik penyertaan dapat dilakukan pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus. Untuk itu diperlukan pemahaman secara komprehensif dan objektif serta berkoordinasi dengan penyidik Polres Sukabumi Kota dengan tujuan saling berbagi informasi dan menghindari duplikasi perkara sertaantisipasi hal- hal yang sifatnya non teknis.

Kata Kunci : Putusan, Notaris/PPAT, Delik Penyertaan

***Application Of The Participation To Notary / PPAT
In Criminal Action of Corruption***

Taufik Effendi* Handoyo Prasetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat Jalan Naripan No.25 Bandung Jawa Barat 40111
email: eff_30700@yahoo.co.id

Abstract

This research is the result of the author's study from the point of view of a prosecutor / public prosecutor, which aims to determine the extent to which the Notary / PPAT can be held accountable for the issuance of the Sale and Purchase Deed (AJB) and the spiltzing of the HGB Certificate (Parent) regarding irregularities in the provision of KPR facilities. as the Decision of the Bandung Corruption Court No: 109 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg dated April 10, 2019, which in his consideration stated that the witness as a Notary / PPAT in the process of handling documents related to the provision of KPR facilities is contrary to the Housing Ministerial Decree. People Number: 09 / KPTS / M / 1995 and PP Number 37 Year 1998. To provide an understanding of the norm problems applied in a legal case through a case approach, the authors use the normative legal research method. Inclusion offense in article 55 (1) -1 of the Criminal Code as an extension of responsibility, especially participating in the implementation, namely medepleger can be applied to Notary / PPAT if the elements of error are fulfilled and in the context of implementing the inclusion offense, case development can be carried out through a pattern of handling special crimes. This requires a comprehensive and objective understanding and coordination with investigators of the Sukabumi City Police with the aim of sharing information and avoiding duplication of cases and anticipating non-technical matters.

Keywords : Decision, Notary / PPAT, Participation Delict

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**. Penulisan Tesis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA** sebagai Rektor UPNVJ tempat dimana penulis menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fak. Hukum UPNVJ yang banyak kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UPNVJ
3. Ibu Dr. Atik Winanti, SH.MH sebagai Ketua Jurusan Fak. Hukum UPNVJ .
4. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH.LLM sebagai Kaprodi Magister Fak.Hukum, UPNVJ .memberikan arahan awal sebelum seminar proposal tesis.
5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH.MH sebagai Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan, saran dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef SH..MKn sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sesuai spesialisasi keilmuan khususnya mengenai ruang lingkup Jabatan Notaris/ PPAT yang merupakan
7. Bapak Riyono sebagai Aspidus Kejati Jawa Barat yang telah memberikan dispensasi kedinasan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua di Banjarmasin dan Palembang serta seluruh keluarga besar semoga ilmu yang didapatkan penulis bermanfaat bagi keluarga
9. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang sebagai motivasi hidup karena sesungguhnya kemewahan dan keindahan adalah waktu bersama kalian.
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana UPNVJ yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jakarta, 23 maret 2021
Penulis

TAUFIK EFFENDI
NPM .1720622102

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana	27
B. Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Publik	33
C. Ajaran Penyertaan Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris.....	43
D. Penyertaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor :109/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Bdg	50
BAB III. METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian	59
B. Sifat Penelitian	59
C. Sumber Data Penelitian	60
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH	66
A. Penerapan Ajaran Penyertaan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan	66
B. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Rangka Penerapan Delik Penyertaan	80
BAB V. PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.	93
DAFTAR PUSTAKA	95
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	